

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Terorisme

Pasca terjadinya tragedi 9/11 yang meruntuhkan gedung *World Trade Center* (WTC) di Washington D. C. Amerika Serikat, isu terorisme menjadi isu yang sangat diperbincangkan di seluruh dunia karena tragedi tersebut telah memakan ribuan korban jiwa dan menciptakan trauma yang sangat mendalam bagi siapa saja yang pernah melihatnya. Isu ini telah menjadi diskursus global yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya kalangan sosial dan politik namun juga kalangan akademisi. Namun walaupun telah menjadi diskursus global pendefinisian terorisme belum memiliki titik temu yang diakui secara global sehingga setiap negara dan lembaga memiliki pendefinisian yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena terorisme merupakan masalah yang dilatarbelakangi oleh masalah atau motif sangat kompleks, sehingga penentuan definisi secara tunggal sangat sulit untuk dilakukan (Adji, 2001).

Banyak perdebatan yang telah terjadi dalam pendefinisian terorisme salah satunya seperti yang dilakukan oleh Shughart dan Thackrah. Shughart (2006) dan Thackrah (2004) mengkritisi penggunaan kata “kekerasan secara ilegal atau tidak sah atau melawan hukum” dalam menentukan kriteria seseorang/satu pihak sebagai teroris karena dalam penafsirannya karakteristik ini memiliki abiguitas dalam menentukan siapa yang salah dan siapa benar. Thackrah (2004) mencontohkan dalam aksi perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat, Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai teroris karena pada saat itu Amerika Serikat yang merupakan koloni Inggris melawan konstitusi Raja George III. Contoh ini menunjukkan abiguitas dimana satu pihak menganggap dirinya sebagai pejuang kemerdekaan, namun pihak lain menanggapnya sebagai teroris. Yaser Arafat (2006) dalam Shughart (2006) berpendapat bahwa perbedaan antara pejuang kemerdekaan dan teroris terletak dari alasan utama mengapa mereka bertikai. Bagi siapa saja yang berjuang untuk

merebut kemerdekaan, melawan penjajah, dan mengusir kolonialis tidak mungkin disebut teroris.

Perdebatan dan tidak adanya definisi yang universal mengenai definisi terorisme tidak sepenuhnya meniadakan definisi terorisme. Dalam menentukan definisi terorisme ini dapat merujuk kepada beberapa terorisme yang terkemuka dan diakui oleh banyak pihak sehingga dapat memberikan gambaran tentang definisi terorisme. Upaya menangani permasalahan terorisme telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke dua puluh dimana tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (*Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism*). Konvensi ini mendefinisikan terorisme sebagai "*crimes against state*". Namun empat puluh tahun kemudian melalui European Convention on The Supression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna terorisme mengalami perubahan dan perluasan makna. Terorisme yang awalnya dimasukkan sebagai kategori *crimes against state* (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan kepala negara atau anggota keluarganya), menjadi *crimes against humanity*, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil . Sedangkan *crimes against humanity* itu sendiri termasuk ke dalam kategori *gross violation of human rights* (pelanggaran HAM berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil (Adisaputra, 2008).

Kata terorisme ini sendiri bersumber dari bahasa Latin yaitu 'terrere' yang berarti '*to tremble*' dan digabungkan dengan sufiks Perancis yaitu '*isme*' yang kemudian secara harfiah terorisme memiliki pengertian yaitu '*to cause the trembling*' yang berarti sebagai tindakan yang memberikan rasa ketakutan (Turman, 2009) agar dapat menjelaskan definisi dari terorisme secara lebih jelas, Turman (2009) mengutip definisi terorisme yang disampaikan oleh Alex P. Schmid salah satu penasihat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendefinisikan terorisme sebagai metode yang menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran dengan menggunakan cara-cara aksi kekerasan secara berulang kali yang dilakukan oleh suatu

kelompok atau individu ataupun *state-actors* dengan alasan yang jelas. Terorisme ini berbeda dengan tindakan kriminal biasa pada umumnya karena pihak yang menjadi target atau korban bukanlah sasaran utama penyerangan namun target-target yang menjadi korban dianggap memiliki keterkaitan atau persamaan dengan lawan dari kelompok atau individu ini (Schimd, 2004). Diamana Hardiman (et al., 2003) menyatakan bahwa motif teoritis melakukan aksi teror mencakup hal yang lebih luas tidak hanya aspek politik tetapi juga termasuk aspek keagamaan dan ideologi.

Dalam perspektif tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian terorisme pada penelitian ini adalah tindakan kekerasan yang melanggar Hukum Humaniter Internasional dan dilakukan oleh *non-state* aktor untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, agama atau tujuan sosial dengan menggunakan ancaman, paksaan, kekerasan dan intimidasi secara ilegal yang ditujukan kepada audiens dengan jumlah yang besar.

2.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat di suatu negara. permasalahan kemiskinan ini dapat melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia walaupun seringkali munculnya permasalahan ini tidak di sadari oleh pihak yang bersangkutan (Suparlan, 1995). Menurut PBB kemiskinan ini didefinisikan sebagai

kondisi di mana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Menurut Van Den Berg (2001) kemiskinan merupakan istilah yang terkait dengan pengertian relatif atau pengertian absolut. Seseorang atau sebuah keluarga dinyatakan relatif miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan yang mereka peroleh atau akses mereka terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan orang lain dalam perekonomian. Kemiskinan juga dapat dilihat dari beberapa tingkat absolut pendapatan atau standar hidup, biasanya tingkat absolt berada pada atau dekat dengan sekedar menyambung hidup secara minimum.

Kemiskinan relatif disebabkan karena kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan di antara lapisan masyarakat. Standar minimum kemiskinan relatif disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita" (BPS, 2008).

Pengukuran Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum ini diukur sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Sehingga penduduk dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan merupakan penduduk dengan kategori miskin. Pengukuran standar hidup

pada garis kemiskinan absolut adalah tetap/tidak berubah sehingga garis kemiskinan absolut memiliki keunggulan karena mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut yang tetap sangat penting untuk mencoba menilai efek dari kebijakan pengentasan kemiskinan antar waktu (BPS, 2008).

Bappenas (2005) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective and subjective*.

Pada penelitian ini pengukuran dan definisi kemiskinan mengacu pada pengukuran dan pendefinisian yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (2008), BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut :

$$GK = GKM + GKNM$$

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Kelompok komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

di mana :

- GKM_j :Garis kemiskinan makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori).
- P_{jk} :Harga komoditi k di daerah j.
- Q_{jk} :Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.
- V_{jk} :Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.
- j :Daerah (perkotaan atau pedesaan).

2.3 Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan pada dasarnya adalah suatu konsep yang menggambarkan penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Dalam pengukurannya distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan dua pendekatan pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut adalah sebuah konsep pengukuran ketimpangan dengan melibatkan parameter yang memiliki satuan nilai yang mutlak sedangkan Ketimpangan relatif adalah sebuah konsep pengukuran ketimpangan pendapatan dengan cara membandingkan besarnya pendapatan yang diperoleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat secara keseluruhan (Sukirno, 1985).

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Todaro dan Smith

(2006) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan beberapa hal, antara lain : (i) inefisiensi ekonomi; (ii) melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas; serta (iii) umumnya dianggap tidak adil. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan ini dibutuhkan alat ukur sebagai acuan, berdasarkan Todara dan Smith (2006) distribusi pendapatan sebagai suatu alat ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif yaitu :

A. Distribusi Personal

Ukuran sederhana ini menunjukkan hubungan antara individu-individu dengan pendapatan total yang mereka terima. Berapa banyak pendapatan masing-masing pribadi, atau apakah pendapatan itu berasal dari hasil kerja semata atautkah dari sumber-sumber lain seperti bunga, laba, hadiah, warisan, dan lain-lain tidak diperhatikan. Lebih jauh lagi, sumber-sumber yang bersifat lokasional (perkotaan atau perdesaan) dan okupasional (misalnya pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa-jasa) juga diabaikan. Semua individu disusun menurut tingkat pendapatannya yang semakin meningkat dan kemudian membagi semua individu tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda-beda, ke dalam kuintil (5 kelompok) atau desil (10 kelompok) sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menentukan proporsi dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing kelompok tersebut.

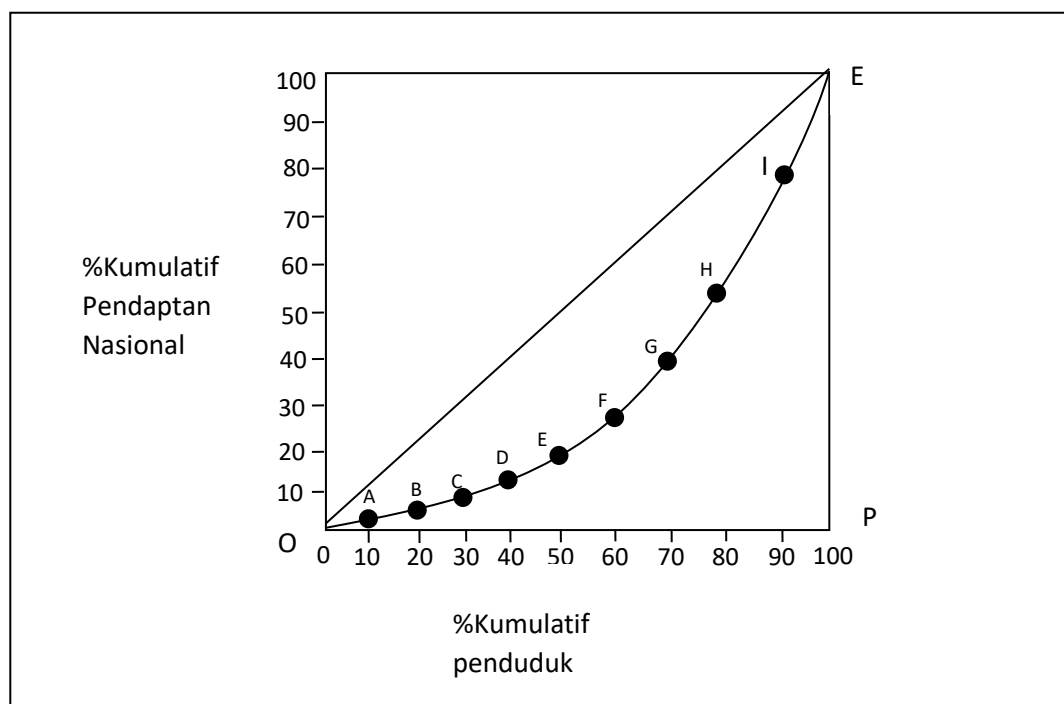
B. Distribusi Fungsional

Ukuran distribusi pendapatan lain yang sering digunakan oleh para ekonom adalah “distribusi fungsional” atau “distribusi pangsa faktor produksi”. Ukuran distribusi ini berusaha untuk menjelaskan pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi . Teori ukuran distribusi pendapatan fungsional menyelidiki presentase yang diterima tenaga kerja secara keseluruhan bukan 26 sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual dibandingkan

dengan presentase dari pendapatan nasional yang terdiri dari : sewa, bunga dan laba.

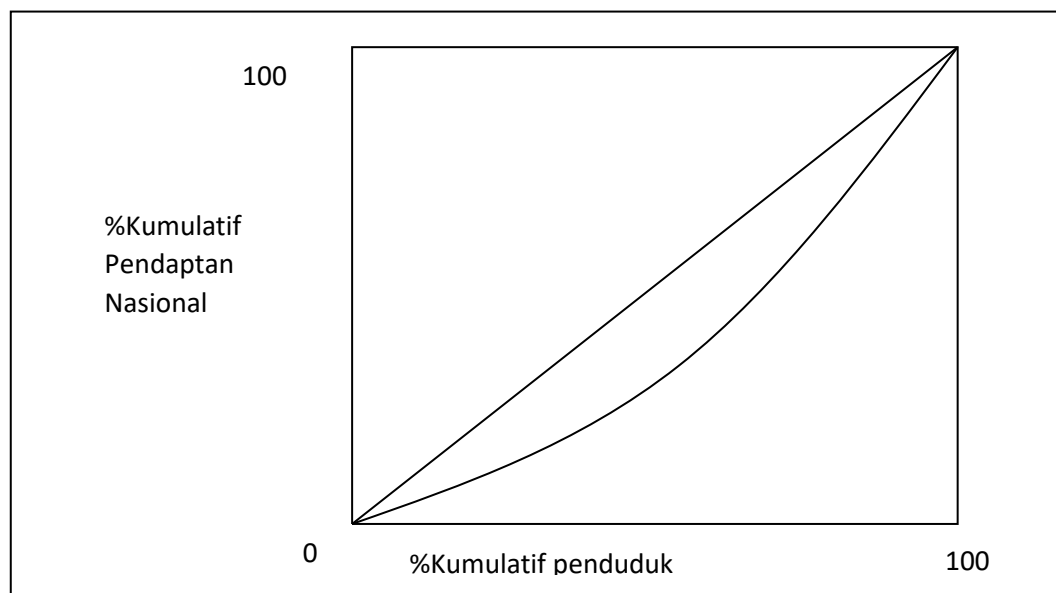
2.3.1 Kurva Lorenz

Metode lain yang biasanya dipakai untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan adalah dengan membuat kurva Lorenz. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk, secara kumulatif pula. Seperti di ilustrasikan pada Gambar 2.1. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya terletak pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebagai contoh 40% kelompok terbawah menerima 40% dari pendapatan total, sedangkan 5% kelompok teratas hanya menerima 5% dari pendapatan total (Todaro dan Smith, 2006).



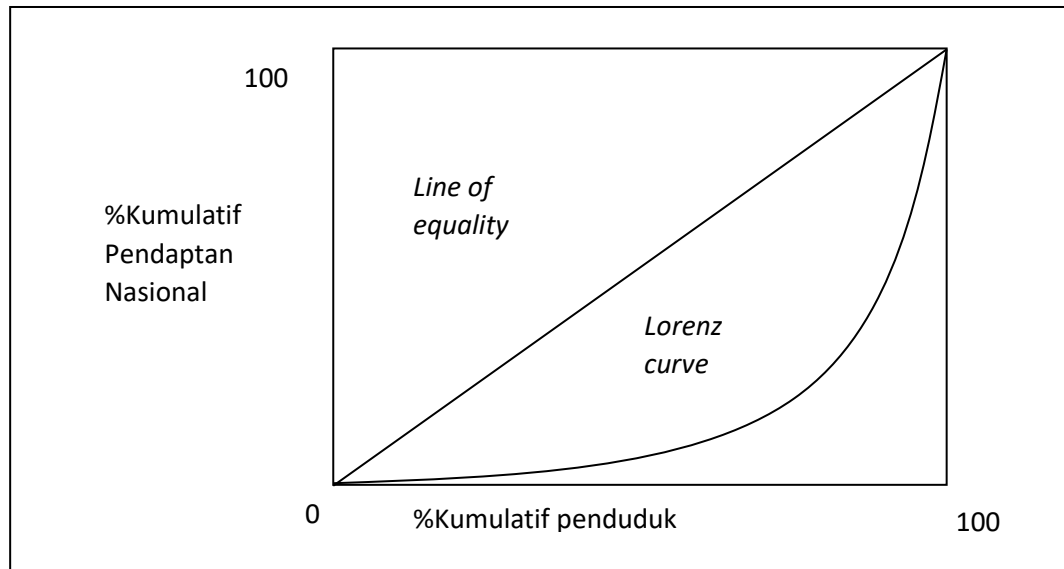
Gambar 2.1 Kurva Lorenz
Sumber: Todaro dan Smith (2006).

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar - benar mereka terima, misalnya dalam satu tahun. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal (garis pemerataan sempurna) maka semakin timpang atau tidak meratanya distribusi pendapatan. Semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan disuatu negara maka bentuk kurva lorenznya pun akan semakin melengkung mendekati sumbu horizontal bagian bawah. Dua macam bentuk kurva Lorenz yang melambangkan kondisi distribusi pendapatan yang jauh berbeda dapat dilihat pada gambar 2.2 yang menunjukkan suatu distribusi pendapatan yang relatif merata (ketimpangan tidak parah), sedangkan gambar. 2.3 menunjukkan suatu distribusi pendapatan yang relatif tidak merata (ketimpangan parah).



Gambar 2.2 Kurva Lorenz Indeks1

Sumber: Todaro dan Smith (2006).

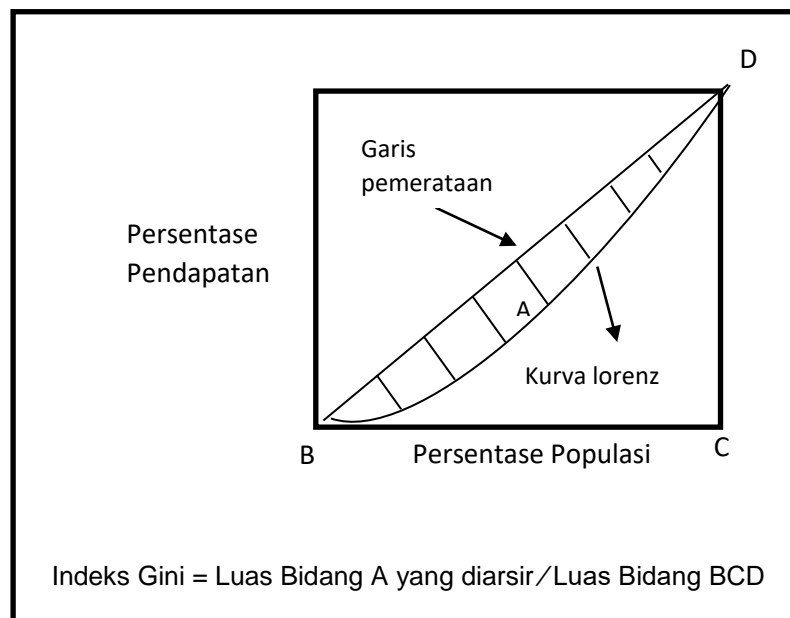


Gambar 2.3 Kurva Lorenz Indeks 2

Sumber: Todaro dan Smith (2006).

2.3.1 Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang angkanya berkisar antara 0 hingga 1. Ide dasar perhitungan koefisien Gini berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan. Kurva tersebut dinamakan kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Guna membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal (Gambar 2.4).



Gambar 2.4 Indeks Gini

Sumber: Todaro dan Smith (2006).

Pada Gambar 2.4, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir. Sedangkan Koefisien Gini atau Gini Ratio adalah rasio (perbandingan) antara luas bidang A yang diarsir tersebut dengan luas segitiga BCD. Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa bila pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal. Artinya, daerah yang diarsir akan bernilai nol karena daerah tersebut sama dengan garis diagonalnya. Dengan demikian angka koefisiennya sama dengan nol. Sebaliknya, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, maka luas daerah yang diarsir akan sama dengan luas segitiga, sehingga Koefisien Gini bernilai satu. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu

Secara matematis indeks gini dapat dihitung dengan rumus berikut (Todaro dan Smith, 2006):

$$GR=1-\sum_{i=1}^k fP_i(FC_i + FC_{i-1})$$

Dengan :

- GR : Koefisien gini.
 fP_i : Frekuensi penduduk pada kelas pengeluaran ke-i.
 FC_i : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i.
 FC_{i-1} : Kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i.

Tabel 2.1 Contoh Perhitungan Koefisien Gini

Kel Kons	Tot Pddk	Tot Pndptn	%Pddk (Fi)	%Pndptn	K%Pndptn (Yi)	(Yi+Yi-1)	Fi*(Yi+Yi-1)
<2000	14286	2236	0.1019	0.0029	0.0029	0.0029	0.0003
2000-2999	27141	68151	0.1936	0.0896	0.0926	0.0955	0.0185
3000-3999	25052	87182	0.1787	0.1147	0.2072	0.2998	0.0536
4000-4999	19108	85566	0.1363	0.1125	0.3198	0.527	0.0718
5000-5999	13809	75507	0.0985	0.0993	0.4191	0.7388	0.0728
7000-7999	17482	120380	0.1247	0.1583	0.5774	0.9964	0.1243
8000-9999	8986	79762	0.0641	0.1049	0.6823	1.2597	0.0807
10000-15000	8874	106223	0.0633	0.1397	0.822	1.5043	0.0952
>15000	5453	135360	0.0389	0.1780	1.0000	1.8220	0.0709
	140191	760367	1.0000	1.0000	Koefisien Gini : 1- 0.5881 =0.4119		

Sumber: Moeis, 2009

Pada penelitian ini ukuran ketimpangan pendapatan negara Indonesia diukur berdasarkan indeks gini dengan derajat ketimpangan dikatakan tinggi bila nilai koefisien gini bernilai 0.5 keatas ketimpangan menengah berkisar 0.36 hingga 0.49 sedangkan untuk distribusi pendapatan yang relatif merata angka koefisien gini berada pada kisaran nilai 0.2 hingga 0.35 (Todaro dan Smith, 2006).

2.4 Pengangguran

Pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*), akan tetapi juga negara-negara yang sudah maju (*developed countries*). Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006).

Menurut Bellante dan Jackson (1990), secara konseptual pengangguran dapat dibedakan antara pengangguran friksional, struktural dan pengangguran karena kurangnya permintaan (*demand deficiency unemployment*) atau pengangguran siklis. Pengangguran karena kurangnya permintaan timbul apabila pada tingkat upah dan harga yang sedang berlaku, tingkat permintaan tenaga kerja secara keseluruhannya terlalu rendah, akibatnya jumlah tenaga kerja yang diminta perekonomian secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan penawaran tenaga kerjanya. Sedangkan, pengangguran struktural dikatakan ada apabila lowongan yang tersedia membutuhkan keahlian yang berbeda dengan yang dimiliki oleh penganggur atau lowongan pekerjaan yang tersedia berada dalam wilayah geografis yang berbeda dengan lokasi tempat tinggal pekerja yang menganggur. Seperti juga halnya dengan pengangguran struktural, pengangguran friksional terjadi diakibatkan oleh proses pencarian kerja dan penyebabnya adalah informasi lowongan kerja yang kurang sempurna serta biaya untuk mengakses informasi tersebut terlalu mahal.

Menurut Lipsey, et al. (1997), pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu pengangguran siklis, pengangguran friksional, dan pengangguran struktural. Pengangguran siklis mengacu kepada pengangguran yang terjadi jika permintaan total tidak memadai untuk

membeli semua keluaran potensial ekonomi, sehingga menyebabkan senjang resesi dimana keluaran aktual lebih kecil daripada keluaran potensial. Orang-orang yang menganggur secara siklis dikatakan sebagai orang yang menganggur terpaksa (*involuntary unemployed*), dalam arti mereka ingin bekerja dengan tingkat upah yang berlaku tetapi pekerjaan tidak tersedia.

Pengangguran struktural dapat didefinisikan sebagai pengangguran yang disebabkan ketidaksesuaian antara struktur angkatan kerja berdasarkan keterampilan, pekerjaan, industri atau lokasi geografis dan juga struktur permintaan akan tenaga kerja. Sedangkan pengangguran friksional diakibatkan oleh perputaran (*turn-over*) normal tenaga kerja. Sumber penting pengangguran friksional adalah orang-orang muda yang memasuki angkatan kerja dan mencari pekerjaan. Sumber lainnya adalah orang-orang yang keluar dari pekerjaannya, baik karena tidak puas dengan kondisi pekerjaan yang sekarang maupun karena diberhentikan. Selain itu, menurut Moore dan Elkin (1987), pengangguran friksional merupakan akibat dari fluktuasi jangka pendek di dalam pasar tenaga kerja, informasi yang tidak sempurna dan tenaga kerja yang tidak bergerak. Sedangkan, pengangguran struktural merupakan karakteristik jangka panjang, dimana terjadi persistensi ketidaksesuaian (*mismatch*) antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan skill dan atau lokasi kerja.

Pengangguran merujuk pada definsi yang dikeluarkan oleh BPS dimana seseorang dikategorikan sebagai menganggur atau mencari pekerjaan apabila termasuk penduduk usia kerja yang : (1) tidak bekerja, atau (2) sedang mencari pekerjaan baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau (3) sedang mempersiapkan suatu usaha, atau (4) yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, atau (5) yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka :

- a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
- c. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "tindakannya nyata", seperti : mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Dimana kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

Pada penelitian ini yang dimaksud sebagai pengangguran adalah penduduk usia kerja yang : (1) tidak bekerja, atau (2) sedang mencari

pekerjaan baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau (3) sedang mempersiapkan suatu usaha, atau (4) yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, atau (5) yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

2.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani "paedagogike". Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata "pais" yang berarti "anak" dan kata "ago" yang berarti "aku membimbing". Jadi paedagogike berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut "paedagogos" (Hadi, 2008, p. 17). Jadi pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak.

Istilah pendidikan memiliki berbagai macam tujuan, salah satunya adalah memberikan dampak positif dengan merestrukturisasi pola kebiasaan pada suatu masyarakat. Menurut para peneliti tujuan umum dari pendidikan adalah proses dimana masyarakat mentransfer pengetahuan, keterampilan dan budaya kepada generasi muda agar dapat melakukan penyesuaian terhadap peradaban atau lingkungan dimana hal ini juga gencar dilakukan oleh institusi pendidikan. Institusi pendidikan ini memiliki peran yang penting dalam mempersiapkan individu agar dapat menerima perubahan dan juga agar mereka dapat menciptakan mekanisme defensif

untuk menyelamatkan budaya yang mereka miliki dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak budaya tersebut (Morin, 1990).

Berdasarkan BPS (2017) pendidikan formal adalah alur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Berdasarkan Suprijanto (2007) pendidikan formal ini memiliki ciri yaitu berupa sistem persekolahan, berstruktur, berjenjang, penyelenggaraannya disengaja. Jenjang pendidikan formal terdiri atas : a) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, meliputi : TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar) atau MI (Madrasah Ibtidaiyah), SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau MTs (Madrasah Tsanawiyah), dan bentuk lain yang sederajat. b) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk SMU (Sekolah Menengah Umum) atau MA (Madrasah Aliyah), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan), atau bentuk lain yang sederajat. c) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka, dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Pada penelitian ini yang dimaksud Jenjang Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV , sarjana, magister, spesialis, doktor dan sederajat yang ditamatkan oleh penduduk 15 tahun ke atas baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ditandai dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan terorisme dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan pendidikan telah diteliti secara luas di berbagai negara di dunia. Berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu terkait terorisme.

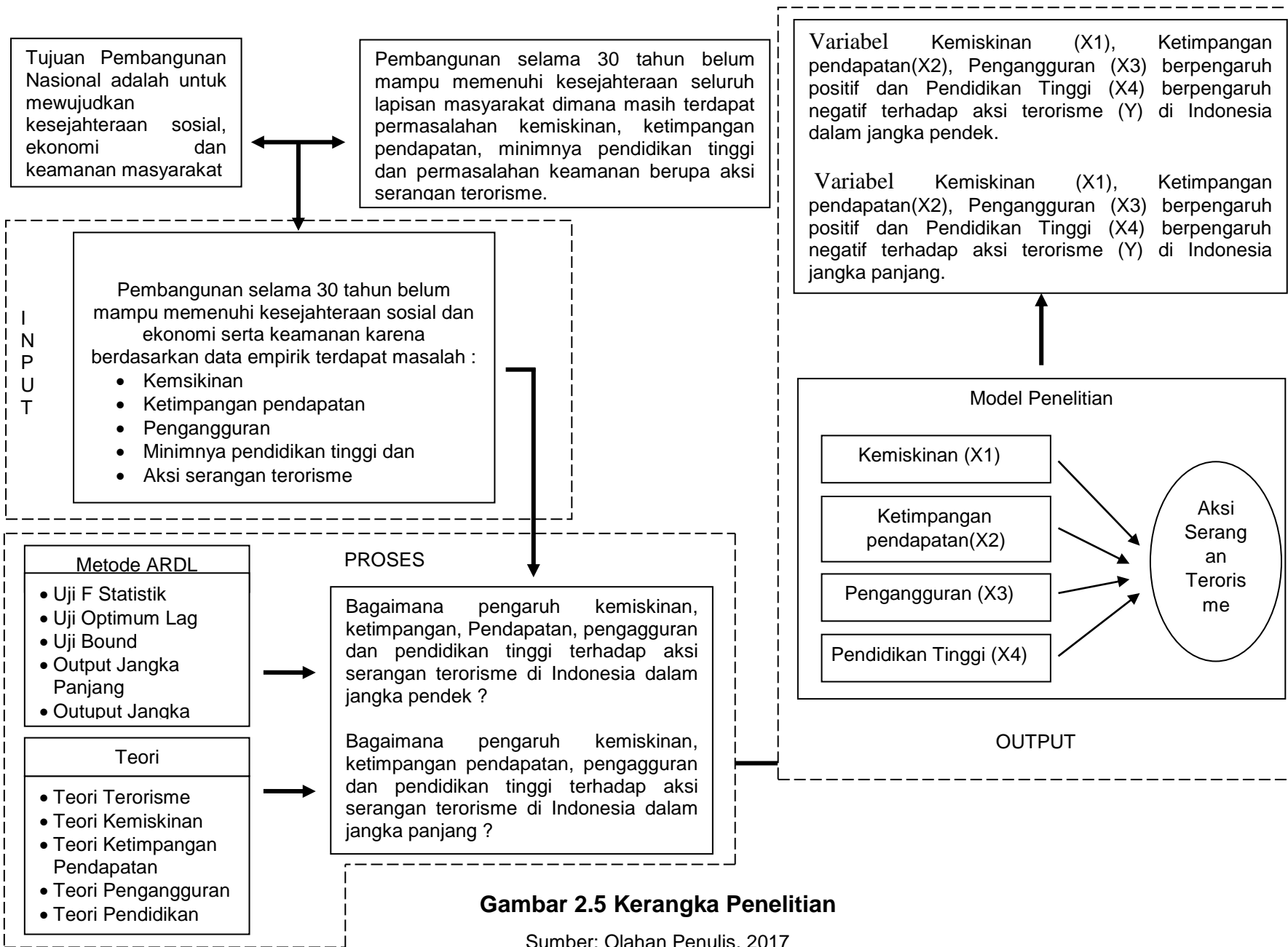
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Terkait Terorisme, Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pendidikan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	A. Townsend, B. Goldberg, and R. Birmingham (2013)	<i>Who Will Strike Next And Why? An Economic Regression of Terrorism and Poverty (Metode Simple regression).</i>	Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan pendapatan meningkatkan serangan terorisme.
2	Muhammad Shabbaz & Faridul Islam (2014)	<i>The income inequality Domestic Terrorism Nexus: Fresh Evidence from Pakistan (Metode ARDL)</i>	Ketimpangan Pendapatan memicu terjadinya terorisme dan ketimpangan pendidikan juga memicu terjadinya terorisme.
3	Kevin B. Goldstein (2005)	<i>Unemployment, Inequality and Terrorism: Another Look at the Relationship between Economics and Terrorism. (Metode OLS)</i>	Ketimpangan pendapatan mengakibatkan terorisme meningkat. Pengangguran usia dewasa meningkatkan terorisme.
4	Naseem Bukhari & Mansur Masih (2016)	<i>An empirical Investigation of casual linkages between domestic terrorism and macroeconomic variabels: a case for Pakistan (Metode ARDL)</i>	Peningkatan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan memicu terjadinya terorisme sedangkan peningkatan pendidikan cenderung mengurangi terorisme.

Sumber : Olahan Penulis, 2017

2.7 Kerangka Penelitian

Aksi serangan terorisme dipengaruhi berbagai macam faktor salah satunya adalah permasalahan domestik seperti permasalahan sosial ekonomi. Permasalahan sosial ekonomi ini menjadi salah satu peluang dan penyebab mudahnya para teroris merekrut anggota-anggota baru karena kelompok teroris memiliki daya tarik yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang memiliki *opportunity cost* yang rendah untuk mendapatkan sumber-sumber modal untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dimana kelompok masyarakat ini dinilai kurang/tidak *marketable*. Di Indonesia yang menjadi tujuan pembangunan Nasional adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat baik secara sosial maupun secara ekonomi serta mewujudkan terciptanya keamanan namun faktanya selama 30 tahun (periode 1986-2016) tujuan pembangunan Nasional ini belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga terdapat permasalahan sosial dan ekonomi berupa kemiskinan, pengangguran, dan minimnya pendidikan tinggi serta aksi serangan terorisme yang menjadi ancaman nyata bagi keamanan negara. Berdasarkan hal ini maka perlu di analisis bagaimana pengaruh kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran dan pendidikan tinggi terhadap aksi terorisme di Indonesia baik pada jangka pendek dan jangka panjang. Variabel=variabel yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah kemiskinan (X1), ketimpangan pendapatan (X2), pengangguran (X3) dan pendidikan tinggi (X4) sebagai variabel *independent* serta variabel aksi terorisme (Y) sebagai variabel *dependent* maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.5 Kerangka Penelitian

Sumber: Olahan Penulis, 2017

2.8 Hipotesis Penelitian

Setelah mengidentifikasi variabel penting dalam suatu situasi dan menetapkan hubungan antar variabel melalui pemikiran logis dalam kerangka teoritis, maka akan dibuat sebuah proposisi yang nantinya akan diuji keberlakuannya dalam sebuah penelitian atau dapat juga dikatakan sebagai dugaan sementara atas jawaban terhadap suatu penelitian. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Sekaran, 2006). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksi terorisme terorisme di Indonesia pada jangka pendek.
- 2) Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksi terorisme terorisme di Indonesia pada jangka pendek.
- 3) Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksi terorisme terorisme di Indonesia pada jangka pendek.
- 4) Pendidikan tinggi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap aksi terorisme terorisme di Indonesia pada jangka pendek.
- 5) Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksi terorisme terorisme di Indonesia pada jangka panjang.
- 6) Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksi terorisme terorisme di Indonesia pada jangka panjang.
- 7) Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksi terorisme terorisme di Indonesia pada jangka panjang.
- 8) Pendidikan tinggi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap aksi terorisme terorisme di Indonesia pada jangka panjang.